

**PERBANDINGAN TINGKAT KELENGKAPAN MANDATORY DISCLOSURE DAN
VOLUNTARY DISCLOSURE INFORMASI AKUNTANSI
(Studi empiris pada Perusahaan BUMN dan BUMS yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2016-2018)**

Salma Kholis Arjunawati*, Nur Diana, dan Afifudin*****
Email : salmakholisa@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

The purpose of this research is actually to find out clearly whether companies that have been managed and owned by the state, namely BUMN companies, have actually made disclosures of financial reporting that have been determined and authorized by Bapepam or are still lacking in making disclosures both compulsorily and voluntarily and as researchers compared the comparison to BUMS companies. Through the calculation of the index value of the completeness of the level of disclosure whose analysis results are used as a comparison using the t test (Independent Sample t-Test), where the results of the study indicate that the significance value (2-tailed) $0.000 < 0.05$ which means H_1 is accepted so it can be concluded that there are significant differences in the level of completeness of mandatory disclosure of accounting information between BUMN and BUMS companies. then shows the significance value (2-tailed) $0.549 > 0.05$ which means H_2 is rejected so it can be concluded that there is no significant difference in the level of voluntary disclosure of accounting information between BUMN and BUMS companies.

Keywords: Level of Completeness, Mandatory Disclosure, Voluntary Disclosure, BUMN, BUMS, Accounting Information.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Adanya pengungkapan informasi akuntansi baik pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) maupun pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dapat meminimalisir asimetri informasi dimana asimetri informasi tersebut terjadi karena salah satu pihak yaitu manajer memiliki akses informasi lebih atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan atau pihak pemangku kepentingan sehingga mengakibatkan munculnya *moral hazard* (Putri dkk, 2018), yang mana manajer berpeluang untuk melakukan tindakan demi memenuhi kebutuhannya sendiri dengan melakukan praktek manajemen laba yaitu memanipulasi laporan keuangan guna agar memperoleh gaji / kompensasi dengan jumlah besar sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pemangku kepentingan yang nantinya akan menimbulkan pertentangan. Sedangkan Investor (pemangku kepentingan) memiliki informasi yang sangat sedikit sulit untuk mengontrol secara efektif terhadap tindakan yang dilakukan oleh manajemen. Disamping itu, investor dalam menanamkan modalnya ke perusahaan menginginkan pembagian dividen yang cepat dan berjumlah besar. Maka, dari peristiwa tersebut muncul awal mula terjadinya konflik kepentingan yang mengakibatkan adanya biaya agensi (*agency cost*) yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Menurut Rinobel dan Laksito (2015) solusi atas segala permasalahan tersebut yaitu melakukan pengungkapan informasi perusahaan yang lebih banyak agar tidak menimbulkan pertentangan atau perselisihan antara pihak manajemen maupun pihak pemangku kepentingan atau investor (*conflict of interest*). Dengan demikian secara otomatis, pengungkapan juga dapat mengurangi *agency cost* melalui penyajian pengungkapan informasi akuntansi keuangan yang terpublikasikan.

Dasar dari pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) adalah sebagaimana diatur dalam kebijakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan SK Ketua Bapepam Nomor KEP-689/BL/2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek yang telah diperbaharui dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2011. Kebijakan terhadap pengungkapan informasi akuntansi dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas transparansi, keterbukaan, keseragaman penyusunan, dan daya banding laporan keuangan. Mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, informasi akuntansi diperlukan tidak hanya dari pengungkapan wajib saja namun pengungkapan sukarela juga perlu dilakukan sehingga perusahaan-perusahaan BUMN maupun BUMS dapat dikelola dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Perbandingan Tingkat Kelengkapan *Mandatory Disclosure* dan *Voluntary Disclosure* Informasi Akuntansi (Studi Empiris Perusahaan BUMN dan BUMS yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) informasi akuntansi pada perusahaan BUMN dan BUMS?
2. Bagaimana perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) informasi akuntansi pada perusahaan BUMN dan BUMS ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) informasi akuntansi pada perusahaan BUMN dan BUMS.
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) informasi akuntansi pada perusahaan BUMN dan BUMS.

Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

Sebagai sarana menambah wawasan, kemampuan berpikir serta referensi mengenai pengaruh kelengkapan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) informasi akuntansi pada perusahaan BUMN dan BUMS.

2. Kontribusi Praktis

Sebagai sarana informasi, pengetahuan dan wawasan bagi perusahaan dalam memberikan rekomendasi suatu kebijakan serta program yang dicanangkan oleh sebuah pemerintahan atau instansi yang terkait sebagai pengambilan keputusan. Sementara itu bagi pemerintahan Sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana perusahaan-perusahaan BUMN dan BUMS telah menjalankan peraturan yang telah ditetapkan dan disahkan terkait dengan kelengkapan pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela dan untuk membantu pemerintahan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan diambil dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam pengambilan keputusan.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pelaporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK Bagian A, 2018) definisi pelaporan keuangan adalah proses memperoleh informasi tentang posisi keuangan entitas pelapor, juga disebut informasi tentang sumber daya ekonomi dan pengaduan terhadap entitas pelapor, memberikan informasi lain tentang kegiatan transaksional yang menyebabkan perubahan sumber daya ekonomi dan pengaduan entitas pelapor.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan struktur organisasi sebuah entitas yang memproses sumber daya fisik atau sumber daya lainnya untuk mengubah data keuangan menjadi sebuah informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi kebutuhan akses informasi bagi pengguna (Mahatmyo, 2014:9).

Pengungkapan (*Disclosure*)

Menurut Apriyanti (2018:88) Pengungkapan (*disclosure*) merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaporan keuangan yang terdapat di bagian akhir proses pelaporan keuangan dengan memberikan penyajian informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan. Pengungkapan dibagi menjadi dua jenis diantaranya pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Fungsi dan Tujuan Pengungkapan

Secara umum, menurut Suwardjono, (2016:580-581) tujuan pengungkapan adalah untuk menyajikan informasi yang dianggap perlu, seperti pencapaian tujuan pelaporan keuangan serta layanan informasi perusahaan untuk semua pengguna data keuangan yang digunakan untuk tujuan yang berbeda tergantung pada kebutuhan pengguna.

1. Tujuan Melindungi
2. Tujuan Informatif
3. Tujuan Kebutuhan Khusus

Kewajaran Pengungkapan

Nilai wajar adalah dasar netral untuk menilai tanggung jawab manajemen dengan menunjukkan dampak keputusan untuk membeli, menjual, atau memiliki aset keuangan, dan menanggung, memelihara, atau membatalkan liabilitas keuangan. Jika suatu unit tidak mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar pada neraca, maka entitas atau unit tersebut harus mengungkapkan informasi nilai wajar dalam pengungkapan tambahan (PSAK No. 50 (Revisi 2006) Reformasi 2007).

Pemakai dan Kebutuhan Informasi

- | | |
|---|---------------|
| 1. Investor | 5. Pelanggan |
| 2. Karyawan | 6. Pemerintah |
| 3. Debitur (Penyedia Pinjaman) | 7. Masyarakat |
| 4. Penyedia dan Pemberi Pinjaman Bisnis Lainnya | |

Jenis dan Sifat Pengungkapan

1. Pengungkapan Wajib (*Mandatory Disclosure*)

Pengungkapan wajib menurut Subroto (2014:15-16) adalah pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Pengungkapan wajib mengharuskan perusahaan mematuhi semua peraturan yang berlaku di pasar modal. Undang-undang pasar modal (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995) memberikan dukungan legislatif terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

2. Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*)

Menurut penelitian Nuswandari (2009), pengungkapan sukarela dipengaruhi oleh jumlah manajer yang mengambil inisiatif untuk memberikan informasi telah meningkat sehingga kebijakan perusahaan untuk memberikan informasi sukarela dalam laporan tahunan akan lebih mengarah pada keragaman atau perbedaan besar dalam informasi antar perusahaan. Pengungkapan informasi secara sukarela oleh perusahaan diluar kewajiban yang telah ditentukan merupakan pengungkapan informasi yang melebihi persyaratan minimum dari peraturan pasar modal yang berlaku.

3. *Signalling Theory*

Konsep pensinyalan (*Signalling Theory*) pertama kali dieksplorasi oleh Akerlof (1970) dalam konteks tentang fenomena ketidakseimbangan informasi yang terjadi diseluruh kualitas produk antara pembeli dan penjual dengan melakukan penelitian riset terhadap pasar yang ada pada mobil bekas (*used car*) yang dikenal dengan istilah asimetri informasi. Teori ini mengungkapkan alasan perusahaan untuk melakukan informasi secara sukarela agar dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak manajerial maupun pihak pemangku kepentingan, selain itu juga untuk membuat investor tetap tertarik pada perusahaan dalam menanamkan modalnya.

Metode Pengungkapan

Metode pengungkapan terkait dengan masalah bagaimana informasi disajikan kepada pengguna secara teknis dalam sejumlah laporan keuangan, bersama dengan informasi terkait lainnya. Dalam hal ini, menurut Suwardjono, (2014:591-601), metode pengungkapan tersebut diantaranya :

1. Pos Laporan Keuangan

Informasi keuangan dapat diungkapkan melalui statemen keuangan dalam bentuk pos atau elemen statemen keuangan sesuai dengan standar tentang definisi, pengukuran, penilaian, dan penyajian.

2. Catatan Kaki

Footnotes atau catatan atas laporan keuangan adalah metode pengungkapan informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk unsur pos atau laporan keuangan.

3. Penjelasan dalam Kurung

Penjelasan singkat berbentuk tanda kurung mengikuti suatu pos dapat dijadikan cara untuk mengungkapkan informasi.

4. Istilah Teknis

Kondisi teknis dan strategis adalah suatu bagian dari pengungkapan. Oleh karena itu, istilah yang benar harus digunakan secara berurutan untuk judul pos laporan keuangan, item, keterangan, atau *subtitle* pelaporan.

5. Lampiran

Laporan keuangan utama dapat dianggap sebagai ringkasan dalam laporan manajemen (internal manajerial). Detail, pernyataan informasi lainnya, daftar rincian, dan lain-lain dapat disajikan sebagai bagian dari lampiran.

6. Komunikasi Manajemen

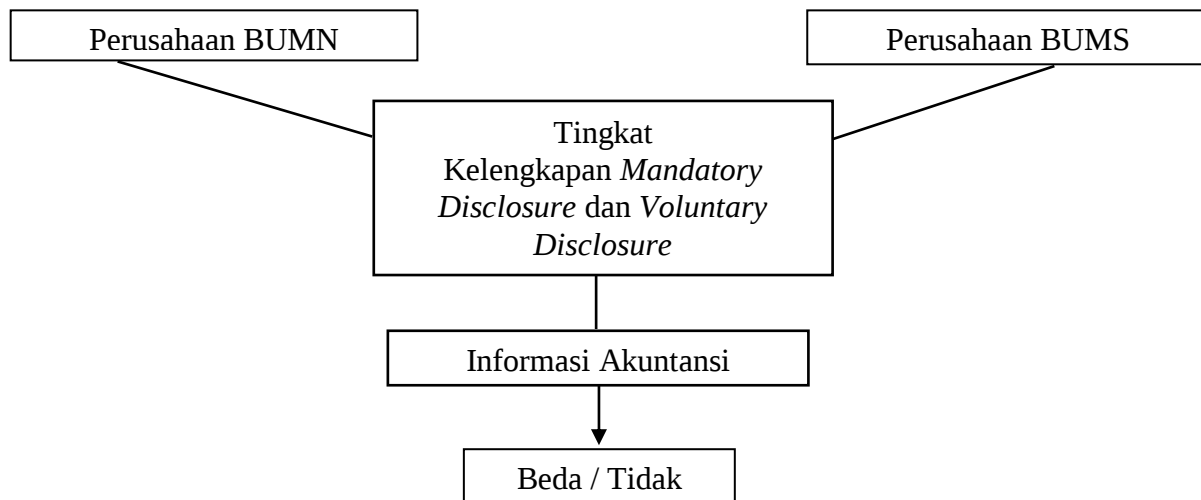
Manajer dapat mengkomunikasikan informasi kualitatif atau non-keuangan yang dianggap penting untuk melaporkan informasi perusahaan kepada pengguna sehingga pengguna dapat mengetahui informasi tersebut dalam berbagai cara, salah satunya yaitu wawancara manajer dengan reporter (konferensi berita atau siaran pers) adalah bentuk publikasi atau komunikasi manajemen

Keluasan dan Kerincian Pengungkapan

Menurut Suwardjono, (2006:581) terdapat tiga tingkat pengungkapan yaitu; 1) Memadai, merupakan level minimum harus dipenuhi sehingga laporan keuangan keseluruhan tidak bias untuk tujuan pengambilan keputusan yang terarah. 2) Adil (*fair*) atau etis, adalah level yang harus dicapai sehingga semua pihak menerima perlakuan atau informasi yang sama. 3) Penuh, membutuhkan presentasi lengkap dari semua informasi yang terkait dengan pengambilan keputusan.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian empiris, maka dapat disimpulkan melalui kerangka konseptual penelitian sebagai berikut.



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual

Pengembangan Hipotesis

- H₁: Terdapat perbedaan signifikan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) informasi akuntansi antara perusahaan BUMN dan BUMS.
- H₂: Terdapat perbedaan signifikan tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) informasi akuntansi antara perusahaan BUMN dan BUMS.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data sekunder, dimana datanya berupa angka-angka yang dapat diukur dalam satuan pengukuran statistik. Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini dapat dikategorikan penelitian komparatif. Sedangkan untuk populasi penelitiannya adalah seluruh perusahaan BUMN dan BUMS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 dimana dalam pengambilan sampel menggunakan metode *proportional stratified sampling* dengan menyeimbangkan jumlah sampel antara perusahaan BUMN dan BUMS serta menggunakan metode *purposive sampling* dengan ketentuan khusus yaitu Perusahaan BUMN dan BUMS yang telah go publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018, Perusahaan BUMN dan BUMS telah menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut pada tahun 2016-2018 terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Perusahaan BUMN dan BUMS menerbitkan laporan keuangan tahunan dalam mata uang rupiah tahun 2016-2018, Perusahaan BUMN dan BUMS yang telah mematuhi peraturan Bapepam LK VIII G 7. Sehingga dari ketentuan tersebut diperoleh jumlah perusahaan BUMN dan BUMS yang telah memenuhi

kriteria sebanyak 36 perusahaan. Dimana jumlah sampel perusahaan BUMN sebanyak 18 perusahaan sedangkan jumlah sampel perusahaan BUMS berjumlah 18 perusahaan.

Pengukuran dan Operasional Variabel

IKP (*Index Of Disclosure Methodology*)

Tingkat kelengkapan pengungkapan menurut Sulisnaningrum & Prabowo (2017) dapat diukur dengan menggunakan *index of disclosure methodology*, seperti *index Wallace*, dengan rumus:

$$\text{Disclosure Index} = \frac{n}{K} \times 100\%$$

Keterangan:

n = Jumlah butir pengungkapan yang terpenuhi

K = Jumlah semua butir pengungkapan yang mungkin dipenuhi

Dalam mengukur Indeks Kelengkapan Pengungkapan (IKP), peneliti menggunakan metode skala *dummy* dimana setiap perusahaan yang telah mengungkapkan *mandatory* maupun *voluntary* diberikan skor 1 sedangkan untuk perusahaan yang tidak mengungkapkan *mandatory disclosure* diberikan skor 0.

Informasi Akuntansi

Untuk mengetahui informasi akuntansi terdapat indikator-indikator yang meliputi informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen.

Informasi Akuntansi Keuangan	Informasi Akuntansi Manajemen
1. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya	1. Informasi <i>Broardscope</i>
2. Pembuatan laporan keuangan dan dilaporkan secara periodik	2. Informasi <i>Timeliness</i>
	3. Informasi <i>Aggregation</i>
	4. Informasi <i>Integration</i>

Sumber : Hasanah dkk, (2015)

Metode Analisa Data

Metode analisis data penelitian ini dilakukan untuk menguji perbedaan tingkat kelengkapan *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* informasi akuntansi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dengan menggunakan uji statistik *Independent Sample t-Test* (uji beda) dengan ketentuan jika nilai *Sig. (2-tailed)* > 0,05 maka *variance* sama tetapi jika nilai *Sig. (2-tailed)* < 0,05 maka *variance* berbeda. Namun sebelum melakukan uji tersebut, diperlukan untuk menguji normalitas data terlebih dahulu dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan ketentuan *Asymp. Sig.* > 0,05 maka data berdistribusi normal serta *Asymp. Sig.* < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

PEMBAHASAN DAN SIMPULAN

Pembahasan

Uji Normalitas Data

Tabel 1. Uji Normalitas Data Perusahaan BUMN

		IKP Mandatory	IKP Voluntary
N		54	54
Normal Parameters ^a	Mean	66.6306	54.1543
	Std. Deviation	6.41299	11.29564
Most Extreme Differences	Absolute	.099	.112
	Positive	.068	.089
	Negative	-.099	-.112
Kolmogorov-Smirnov Z		.731	.819
Asymp. Sig. (2-tailed)		.659	.513

Sumber : Data Diolah, 2020

Hasil uji normalitas data pada perusahaan BUMN diketahui bahwa besaran nilai *Test Kolmogorov-Smirnov* terhadap IKP *Mandatory* adalah 0,731 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0.659 dan besaran nilai *Test Kolmogorov-Smirnov* terhadap IKP *Voluntary* adalah 0.819 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0.513 yang berarti baik data IKP Wajib maupun data IKP Sukarela masing-masing berdistribusi normal dikarenakan nilai signifikansi IKP Wajib = 0.659 dan nilai signifikansi IKP Sukarela = 0.513 masing-masing menunjukkan lebih dari 0,05.

Tabel 2. Uji Normalitas Data Perusahaan BUMS

		IKP Mandatory	IKP Voluntary
N		54	54
Normal Parameters ^a	Mean	54.1570	55.2776
	Std. Deviation	5.83136	7.78804
Most Extreme Differences	Absolute	.138	.130
	Positive	.138	.086
	Negative	-.117	-.130
Kolmogorov-Smirnov Z		1.015	.952
Asymp. Sig. (2-tailed)		.254	.325

Sumber : Data Diolah, 2020

Hasil uji normalitas data pada perusahaan BUMS diketahui bahwa besaran nilai *Test Kolmogorov-Smirnov* terhadap IKP *Mandatory* adalah 1.015 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0.254 dan besaran nilai *Test Kolmogorov-Smirnov* terhadap IKP *Voluntary* adalah 0.952 dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0.325 yang berarti baik data IKP Wajib maupun data IKP Sukarela masing-masing berdistribusi normal dikarenakan nilai signifikansi IKP Wajib = 0.254 dan nilai signifikansi IKP Sukarela = 0.325 masing-masing menunjukkan lebih dari 0,05.

Uji Independent Sample t-Test terhadap IKP Mandatory

Tabel 3. Group Statistics

IKP		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Hasil Tingkat Kelengkapan Pengungkapan	IKP Mandatory BUMN	54	66.6306	6.41299	.87270
	IKP Mandatory BUMS	54	54.1570	5.83136	.79355

Sumber : Data Diolah, 2020

Tabel 4. Uji Independent Sample t-Test terhadap IKP Mandatory^a

		Levene's Test for Equality of Variances	
		F	Sig.
Hasil Tingkat Kelengkapan Pengungkapan	Equal variances assumed	.754	.387
	Equal variances not assumed		

Sumber : Data Diolah, 2020

Tabel 5. Uji Independent Sample t-Test terhadap IKP Mandatory^b

t-test for Equality of Means						
t	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
10.575	106	.000	1.247.352	117.954	1.013.496	1.481.207
10.575	105.056	.000	1.247.352	117.954	1.013.472	1.481.232

Sumber : Data Diolah, 2020

Hasil *group statistics* menunjukkan bahwa hasil analisis deskriptif dari data penelitian IKP Mandatory BUMN dan IKP Mandatory BUMS memiliki jumlah sampel (n) masing-masing 54 dan 54, dimana dari jumlah n tersebut diperoleh *mean* (nilai rata-rata) IKP Mandatory pada perusahaan BUMN sebesar 66.63% dan IKP Mandatory pada perusahaan BUMS sebesar 54.15%. sedangkan untuk standar deviasi diperoleh masing-masing 6.41% dan 5.83%.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dengan menggunakan metode *dummy* menunjukkan bahwa besaran tingkat kelengkapan pengungkapan wajib pada perusahaan BUMN yang memperoleh nilai tertinggi yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2016 hingga 2018 secara berturut-turut terus mengalami peningkatan terhadap informasi wajib sebesar 74.04%, 75.76% dan 77.88%. Perusahaan BUMN yang mendapat besaran tingkat pengungkapan wajib dengan nilai terendah pada tahun 2018 adalah PT. Indo Farma (Persero) Tbk dengan kode saham INAF dan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. masing-masing memperoleh nilai 52.88% dan 57.69%.

Sedangkan besaran tingkat kelengkapan pengungkapan wajib pada perusahaan BUMS yang memperoleh nilai tertinggi adalah PT. Indocement Tungal Prakarsa Tbk pada tahun 2018 sebesar 70.19%. Perusahaan BUMS yang mendapat nilai terendah dalam melakukan

pengungkapan informasi wajib pada tahun 2018 adalah PT. Bank Bukopin Tbk dan PT. Bakrie Telecom Tbk masing-masing sebesar 48.08% dan 48.08%

Pengujian Hipotesis 1

Berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan uji statistik *Independent Sample t-Test* diketahui bahwa nilai signifikansi (*2-tailed*) sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan nilai signifikansi (*2-tailed*) kurang dari 0,05, maka kedua *variance* yang berbeda tersebut dinyatakan memiliki perbedaan yang signifikan yang berarti H_1 dapat diterima. Berdasarkan hasil penelitian pengujian hipotesis 1 terkait dengan perbedaan tingkat kelengkapan *mandatory disclosure* antara perusahaan BUMN dan BUMS telah dibuktikan memang terdapat adanya perbedaan pengungkapan atas pos-pos laporan keuangannya dari masing-masing item / butir pengungkapan yang telah diungkapkan suatu perusahaan, tergantung kebijakan masing-masing manajer perusahaan untuk mematuhi peraturan Bapepam yang berlaku mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik karena ada sebagian perusahaan melakukan pengungkapan secara penuh hampir semua yang ada di peraturan diungkapkan, yang terkandung dalam informasi keuangan, profil perusahaan, laporan direksi, tata kelola perusahaan dan lain-lain. Namun ada juga sebagian perusahaan yang memilih tidak mengungkapkan secara penuh melainkan hanya dengan butir-butir pengungkapan wajib tertentu saja yang diungkapkan, maka hal ini mempengaruhi besaran tertinggi dan terendah tingkat kelengkapan *mandatory disclosure* antara perusahaan BUMN dan BUMS.

Uji Independent Sample t-Test terhadap IKP Voluntary

Tabel 6. Group Statistics

IKP		N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Hasil Tingkat Kelengkapan Pengungkapan	IKP Voluntary BUMN	54	54.1543	11.29564	1.53714
	IKP Voluntary BUMS	54	55.2776	7.78804	1.05982

Sumber : Data Diolah, 2020

Tabel 7. Uji Independent Sample t-Test terhadap IKP Voluntary^a

		Levene's Test for Equality of Variances	
		F	Sig.
Hasil Tingkat Kelengkapan Pengungkapan	Equal variances assumed	6.130	.015
	Equal variances not assumed		

Sumber : Data Diolah, 2020

Tabel 8. Uji Independent Sample t-Test terhadap IKP Voluntary^b

t-test for Equality of Means						
T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
- .602	106	.549	-112.333	186.709	482.502	257.835
- .602	94.101	.549	-112.333	186.709	483.043	258.376

Sumber : Data Diolah, 2020

Hasil *group statistics* tersebut menunjukkan bahwa hasil analisis deskriptif dari data penelitian IKP Voluntary BUMN dan IKP Voluntary BUMS memiliki jumlah sampel (n) masing-masing 54 dan 54, dimana dari jumlah n tersebut diperoleh *mean* (nilai rata-rata) IKP Voluntary pada perusahaan BUMN sebesar 54.15% dan IKP Voluntary pada perusahaan BUMS sebesar 55.27%. Sedangkan untuk standar deviasi diperoleh masing-masing 11.29% dan 7.78%.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dengan menggunakan metode *dummy* menunjukkan bahwa besaran tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) pada perusahaan BUMN yang memperoleh nilai tertinggi yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada 2018 sebesar 78.79%, dimana dalam hal ini Bank BRI telah melakukan pengungkapan sukarela mengenai dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang telah diungkapkan termuat dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan dana penyaluran pendidikan serta dana penyaluran lingkungan hidup sebagai bahan bantuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat atas kepedulian sosial perusahaan. Perusahaan BUMN yang mendapat besaran tingkat pengungkapan sukarela dengan nilai terendah pada tahun 2018 adalah PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk dengan kode saham SMBR memperoleh nilai 39.39%.

Sedangkan besaran tingkat kelengkapan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) pada perusahaan BUMS yang memperoleh nilai tertinggi adalah PT. Elnusa Tbk pada tahun 2018 sebesar 69.70%. Perusahaan BUMS yang memperoleh nilai tingkatan kelengkapan sukarela minum pada tahun 2018 adalah PT. Acset Indonusa Tbk dan PT. Bakrie Telecom Tbk masing-masing memperoleh tingkatan persentase kelengkapan pengungkapan sukarela sebesar 51.52% dan 48.48%.

Pengujian Hipotesis 2

Berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan uji statistik *Independent Sample t-Test* diketahui bahwa nilai signifikansi (*2-tailed*) sebesar 0.549 sehingga dapat disimpulkan nilai signifikansi (*2-tailed*) lebih dari 0,05, maka *variance* memiliki kesamaan. Dengan demikian hasil uji statistik *Independent Sample t-Test* menyatakan bahwa tidak memiliki perbedaan yang signifikan yang berarti H_2 ditolak. Berdasarkan hasil penelitian pengujian hipotesis 2 terkait dengan perbedaan tingkat kelengkapan *voluntary disclosure* antara perusahaan BUMN dan BUMS telah dibuktikan bahwa sebagian besar perusahaan BUMN dan BUMS memiliki kesamaan dalam melakukan informasi sukarela yang kebanyakan perusahaan menekankan pada aset tak berwujud yang dipertimbangkan sebagai pengungkapan sukarela terkait dengan *going concern* / keberlangsungan hidup suatu perusahaan, pengungkapan pada proyeksi perusahaan atas informasi keuangan, pengungkapan lingkungan hidup serta pengungkapan dana penyaluran CSR dimana informasi tersebut merupakan suatu tindakan perusahaan akan kesadaran sosial yang tinggi kepada masyarakat dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan

terhadap kondisi sosial perusahaan, kegiatan operasional perusahaan dan juga bentuk pertanggungjawaban kepada investor sebagai pihak penanam modal.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi Hasil Temuan

Implikasi hasil temuan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Implikasi Teoritis, menyajikan suatu gambaran tingkat kelengkapan pengungkapan yang telah dilakukan oleh perusahaan BUMN dan BUMS melalui teoritikal yang relevan bersumber dari pencetusnya secara langsung terkait dengan teori pengungkapan dan semua yang terkandung didalamnya sebagai salah satu bentuk dukungan atau dorongan terhadap pembuktian teori melalui penelitian ini digunakan sebagai solusi dalam memecahkan masalah terkait adanya asimetri informasi antara pihak manajerial dan pihak eksternal agar kasus tersebut dapat berkurang.
2. Implikasi Manajerial, menyajikan suatu gambaran terkait dengan kontribusi praktis bagi manajemen sebagai salah satu bentuk dorongan bagi manajer untuk melakukan pertanggungjawaban kepada publik terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara lengkap baik hukumnya wajib maupun sukarela.
3. Implikasi Metodologi, menyajikan suatu gambaran terkait dengan metode penelitian yang bersifat komparatif dalam penelitian ini telah dilakukan secara baik melalui analisis data terlebih dahulu dengan membandingkan pengungkapan laporan keuangan suatu perusahaan dengan item (butir-butir) pengungkapan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Kesulitan dalam penelitian ini disebutkan bahwa dalam menganalisis data, terlebih dahulu harus menentukan jumlah sampel yang relatif banyak minimal jumlah sampel 80 perusahaan agar hasil perbandingan pengungkapan ini lebih detail dan jelas. Sehingga untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperhatikan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diperbandingkan.

Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan tahunan sebagai obyek penelitian untuk mengetahui perbandingan tingkat kelengkapan *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* pada perusahaan BUMN dan BUMS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 sehingga peneliti tidak menggunakan obyek penelitian lainnya seperti *website* resmi masing-masing perusahaan untuk menggambarkan pengungkapan sukarela yang sesungguhnya dan memungkinkan suatu perusahaan tersebut mengungkapkannya melalui media *online (website)*.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 36 sampel penelitian yang terdiri dari 18 sampel perusahaan BUMN dan 18 sampel perusahaan BUMS.
3. Teori dalam penelitian ini hanya terfokuskan pada beberapa teori saja, sedangkan untuk dapat memahami secara detail terkait dengan penelitian ini dibutuhkan teori-teori yang mendukungnya seharusnya lebih banyak sehingga penelitian ini mudah untuk dicerna pada kalangan mahasiswa, dosen, praktisi, maupun masyarakat awam.
4. Studi empiris penelitian ini adalah BUMN dan BUMS, sedangkan pada kenyataannya perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sangat sedikit sehingga jumlah populasi perusahaan BUMN tidak sebanding dengan jumlah populasi perusahaan BUMS, maka hal tersebut mengakibatkan peneliti untuk memberikan kriteria pengambilan sampel yang lebih mengerucut pada perusahaan BUMS yang memiliki jumlah populasi keseluruhan sangat banyak.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :

1. Sebaiknya untuk mengukur perbandingan tingkat kelengkapan *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* informasi akuntansi pada perusahaan BUMN dan BUMS yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2018 obyek penelitiannya tidak hanya melalui laporan keuangan tahunan saja namun juga menggunakan obyek penelitian lainnya yaitu melalui *website* resmi perusahaan atau media *online* lainnya sehingga peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa menggambarkan pengungkapan sukarela yang sesungguhnya agar hasil penelitian tersebut lebih akurat dan dapat dipercaya.
2. Sebaiknya penelitian selanjutnya diharapkan memberikan keluasan sampel penelitian dengan menambah sampel penelitian lebih banyak lagi sehingga subyek (perusahaan) yang dijadikan perbandingan tersebut lebih jelas dan hasilnya lebih maksimal.
3. Sebaiknya penelitian selanjutnya diharapkan lebih menambah dan mengembangkan teori-teori mengenai pengungkapan informasi keuangan agar tidak terfokus pada teori-teori tertentu saja. Misal, lebih banyak mengambil teori dari jurnal internasional yang tentunya jurnal tersebut valid untuk dijadikan sebagai literatur penelitian atau dari buku internasional.
4. Sebaiknya penelitian selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan terlebih dahulu studi empiris yang hendak dijadikan subyek penelitian dengan mencari literatur atau melihat daftar perusahaan sektor mana yang hendak akan dijadikan tempat studi penelitian terkait jumlah populasi masing-masing perusahaan yang akan dibandingkan melalui *website* resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Sehingga misal jumlah populasi perusahaan A dengan populasi perusahaan B tidak berbeda terlalu jauh.

DAFTAR PUSTAKA

- Akerlof, George A. 1970. *The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and Market Mechanism. The Quarterly Journal of Economics*. 84 (3): 488-500.
- Apriyanti, Hani W. 2018. *Teori Akuntansi Berdasarkan Pendekatan Syariah*. Edisi Pertama. Deepublish (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA). Yogyakarta
- Hasanah, Fatimah Hayatul dkk. 2015. Pengaruh Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial. *Prosiding Akuntansi*. 1 (2): 432.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 September 2007*. Edisi ke-2. Paragraf 83, Hal. (50.21). Salemba Empat. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2018. *Standar Akuntansi Keuangan Efektif per Januari 2018, Bagian A*. Hal. (6:1.12).
- Mahatmyo, Atyanto. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Pertama. Deepublish. Yogyakarta.
- Nuswandari, Cahyani. 2009. Pengungkapan Pelaporan Keuangan dalam Perspektif *Signalling Theory*. *Jurnal Ilmiah Kajian Akuntansi*. 1 (1): 54-56.

- Putri, Dhea Ayu Rosita dkk. 2018. Asimetri Informasi dan *Mandatory Disclosure* Konvergensi Internasional *Financial Reporting Standard*: Efek terhadap Relevansi Nilai Informasi Laba dan Nilai Buku. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. 18 (1): 3-6.
- Rinobel, Bella. 2015. Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Ukuran Perusahaan, *Financial Leverage* dan Manajemen Laba terhadap *Cost of Equity* Perusahaan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Subroto, Bambang. 2014. *Pengungkapan Wajib Perusahaan Publik Kajian Teori dan Empiris*. UB Press. Malang.
- Sulisnaningrum, Ema & Prabowo, Bambang H. 2017. Pengaruh Faktor-Faktor Keuangan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan Berbasis Sak Etap pada Koperasi Wanita Kota Malang. *Ekonomika: Jurnal Ekonomi*. 10 (2): 55-57.
- Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-689/BL/2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.
- Suwardjono. 2016. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi ke-3. BPFE-YOGYAKARTA. Yogyakarta.

*) Salma Kholis Arjunawati adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

**) Nur Diana adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

***) Afifudin adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.